

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Afifuddin, dan Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Astari, Syahena Agastya. "Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bogor-Indonesia, Yayasan Al-Hisbah. "Definisi Hisbah." Diakses April 23, 2026. <http://www.hisbah.net>.
- Bagus Guntur Tri Pamungkas. 14 Februari 2026. "Wawancara Dengan Pedagang Angkringan Di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Jombang".
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Exagrafika, 2009.
- Dodi. *Metode Penelitian*. 242-243.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. PT Raja Grafindo, 2012.
- Faizal Ahmad Yanuar. 20 Juni 2026. "Wawancara Dengan Staff Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang".
- Hanjaya. "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makasaar, 2018.

- Hartini, Sri. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasanah, Sovia. “Arti Tindakan Penertiban Non Yustisial oleh Satpol PP.” Diakses November 23, 2025. <https://share.google/gauYI2wR4w2mZt0tM>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hendriyx Prastyo S.H. 10 November 2025. “Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Jombang”.
- Indonesia Legal Center Publishing. *Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Karya Gemilang, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Izmi, Nur. “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Marpaung, Martalak Mario. “Hambatan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Satpol PP Wilayah Daerah Kota Magelang).” Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Misdayanti, Kartasapoetra. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

- Pemerintah RI. *Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 10 ayat 2*, 2024.
- Pemerintah RI. *Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 6*, 2010.
- Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6*, 2018.
- Pemerintah RI. *Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 1*, 2010.
- Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3,4,5,6,7*, 2018.
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 7*, 2014.
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat 1 dan 2*, 2014.
- Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Rahman, Miftahur. “Ulil Al-Amr dalam Al-Qur’an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadits* 16, no. 2 (2017): 1–274.
- Raffa. 14 Februari 2026. “Wawancara Dengan Pedagang Angkringan Di Jalan Gus Dur Kabupaten Jombang”.

- Saputra, Yudi Permana, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Muh. Risnain. “Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP Honorer Dalam Bertugas Di Daerah.” *Jurnal Education and development* 8, no. 2 (2020): 480.
- Satori, Djaman, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Septian. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, 1987.
- Solihah, Ratnia. “Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik.” *TAPIS* 13, no. 02 (2017): 1–118.
- Sovia, Sheyla Niclatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatullah, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Suwardi. “Realisasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.” Diakses Juni 24, 2025.
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+realisasi+perda+no.11+tahun+2001>.
- Syarif, Muzar Ibnu. *Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Tohir, Toto. “Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA.” *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 18, no. 3 (2002): 1–272.
- Yeni Fidiyari S.H. 10 November 2025. “Wawancara Dengan Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Jombang”.